**BAB I**

**PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang

1.1 **Latar Belakang**

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, daerah dengan daerah, dan juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat 1 mengamanatkan bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”. Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Disamping itu, sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Renstra untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut meliputi aspek aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah, penerapan penganggaran secara terpadu, dan penerapan penganggaran berdasarkan kinerja. Dengan mengacu kepada perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran tersebut, akan lebih menjamin peningkatan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran.

**1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentanag Badan Usaha Milik Daerah
4. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
5. Perstursn Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten agetan Tahun 2009 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 57);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 entang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89);

**1.3. Maksud dan Tujuan**

**1.3.1 Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai upaya ke depan untuk :

1. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antar perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ke depan, antar sub bagian yang ada di lingkungan Bagian Administrasi perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan ;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien serta menjamin adanya *sustainability* (kesinambungan) program dari waktu ke waktu.

1.3.2 Tujuan .

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bagian Administrasi Perekonomianantara lain :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi Bagian Administrasi Perekonomian untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang;
2. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Bagian Administrasi Perekonomian;
3. Menjamin terciptanya konsistensi, sinergi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran selama 5 (lima) tahun;
4. Menetapkan indikator kinerja daerah dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pembangunan daerah baik tahunan maupun lima tahunan.

**1.4. Sistematika Penulisan**

PenyusunanRenstraBagian Administrasi Perekonomian Sekretraiat DaerahTahun 2018-2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pengantar yang berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menggambarkan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISUSTRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan prangkat daerah, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan penentuan isu-isu strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan tujuan dan sasaran menengah perangkat daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, serta kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang indikator dan target kinerja urusan penunjang

BAB VIII : PENUTUP

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

**2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64), Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai tugas membantu Bupati sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok

Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan, perumusan pedoman dan dan menyusun bahan koordinasi di bidang BUMD, perbankan, penyertaan modal, investasi, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, periwisata, industri, perdagangan, ,jasa, koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

2.1.2 Fungsi

Guna melaksanakan tugas Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai fungsi :

* + 1. Penyusunan dan pengolahan bahan regulasi, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan monitoring evaluasi bidang BUMD, perbankan, penyertaan modal dan investasi.
    2. Penyusunan dan pengolahan bahan regulasi, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan monitoring evaluasi bidang pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan.
    3. Penyiapan dan Pengolahan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk tehnis pembinaan Penyusunan dan pengolahan bahan regulasi, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan monitoring evaluasi bidang periwisata, industri, perdagangan, jasa, koperasi dan UKM dan pengendalian inflasi daerah.
    4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris Daerah

**2.1.3Struktur Organisasi Dan Eselonisasi Jabatan**

Bagian Administrasi Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah dengan eselon Jabatan III/A.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kepala Bagian Administrasi Perekonomian dibantu 3 (tiga) Kepala Sub Bagian bereselon jabatan IV/a, yang mempunyai Tugas sebagai berikut :

* 1. Sub Bagian Bina Usaha Daerah dan Investasi, mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan kajian pemerintah daerah bidang BUMD, perbankan, penyertaan modal dan investasi.
2. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan pembinaan bidang BUMD, perbankan, penyertaan modal dan investasi.
3. Menyusun regulasi terkait BUMD, perbankan, penyertaan modal dan investasi
4. Mempersiapkan rapat koordinasi dengan pengelola BUMD dan perbankan dalam rangka peningkatan kinerja
5. Melaksanakan urusan administrasi surat keluar /masuk dan penataan kearsipan di lingkup Bagian Administrasi Perekonomian.
6. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Perekonomian
   1. Sub Bagian Bina Produksi, mempunyai tugas sebagai berikut :
7. Mengolah dan mengumpulkan data di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan melalui koordinasi dengan instansi terkait sebagai bahan penentuan kebijakan
8. Menyiapkan program pembinaan dan petunjuk teknis terhadap usaha peningkatan produksi pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan.
9. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna menyamakan persepsi dan langkah pelaksanaan kegiatan dibidang pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan.
10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap distribusi Beras untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
11. Melaksankan monitoring evaluasi dan penagiahn terhadap kredit Ekonomi Rakyat (KEK) Intan Pesada.
12. Melaksankan urusan administrasi kepegawaian dan aset di lingkup Bagian Administrasi Perekonomian.
13. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Perekonomian
    1. Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian, mempunyai tugas :
14. Mengolah dan mengumpulkan data sebagai bahan kajian pemerintah di bidang pariwisata, industri, perdagangan, jasa, koperasi dan usaha kecil menengah.
15. Menghimpun laporan bahan dan data kebutuhan pokok masyarakat, bekerjasama dengan instansi terkait sebagai bahan evaluasi.
16. Menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan Dana Bagi Hasil cukai Hasil Tembakau
17. Melaksanakan dan mengevaluasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau dengan cara bekerjasama dengan instansi terkait agar peruntukkannya sesuai dengan aturan yang berlaku.
18. Melaksanakn koordinasi dengan instansi lintas sektor dalam pelaksanaan program Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT).
19. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersama instansi terkait
20. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program pengendalian inflasi daerah
21. Melaksanakan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkup Bagian Administrasi Perekonomian
22. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Perekonomian

**STRUKTUR ORGANISASI**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**

**BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN**

KEPALA BAGIAN

ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

KASUBAG BINA USAHA DAERAH DAN INVESTASI

KASUBAG

BINA SARANA PEREKONOMIAN

KASUBAG

BINA PRODUKSI

STAF PELAKSANA

STAF PELAKSANA

STAF PELAKSANA

**2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bagian Administrasi Perekonomian didukung sumber daya manusia (PNS) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah PNS berdasarkan golongan/ruang

***Tabel 2.1***

***Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang***

| **No** | **Golongan/Ruang** | **Jumlah (orang)** |
| --- | --- | --- |
| 1. | IV/b | - |
| 2. | IV/a | 1 |
| 3. | III/d | 3 |
| 4. | III/c | 4 |
| 5. | III/b | 2 |
| 6. | III/a | 1 |
| 7. | II/d | - |
| 8. | II/c | - |
|  | Jumlah | 11 |

*Sumber : Pengelola Kepegawaian Bagian Adm. Perekonomian*

1. Jumlah PNS berdasarkan jabatan/eselon

***Tabel 2.2***

***Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jabatan** | **Eselon** | **Jumlah (orang)** |
| 1. | Kepala Bagian | III.a | 1 |
| 2. | Kasubag | IV.a | 3 |
| 3. | Staf/Pelaksana | - | 7 |
|  | Jumlah |  | 11 |

*Sumber : Pengelola Kepegawaian Bagian Adm. Perekonomian*

1. Jumlah PNS berdasarkan tingkat pendidikan

***Tabel 2.3***

***Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Jabatan** | **Jumlah (orang)** |
| 1. | Strata 2 (S2) | - |
| 2. | Strata 1 (S1) | 10 |
| 3. | Sarjana Muda (D3) | - |
| 4. | SLTA | 1 |
|  | Jumlah | 11 |

*Sumber : Pengelola Kepegawaian Bagian Adm.Perekonomian*

1. Jumlah PNS yang telah mengikutinDiklat Kepemimpinan

***Tabel 2.4***

***Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Diklat Kepemimpinan** | **Jumlah (orang)** |
| 1. | Diklatpim Tk. III | 1 |
| 2. | Adum/Adumla/Diklatpim Tk.IV | - |
| 3. | Belum Diklat | 3 |
|  | Jumlah | 4 |

*Sumber : Pengelola Kepegawaian Bagian Adm. Perekonomian*

**2.3. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian Administrasi Perekonomian melaksanakan kegiatan sesuai peran dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Renstra Bagian Administrasi Perekonomian Tahun 2013-2018 yang telah dievaluasi sebagaimana tabel dibawah ini. Hasil evaluasi Renstra Bagian Administrasi Perekonomian periode 2013-2018 merupakan informasi utama bagi penyusunan Renstra Bagian Administrasi Perekonomian Tahun 2018-2023.

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Bagian Adm. Perekonomian Setda)

Kabupaten Magetan 2013-2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD\*\*\*) | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD  (2013-2018) | | | | | Realisasi Capaian (2013-2018) | | | | | Rasio Capaian (2013-2018) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah monev pelaksanaan pelayanan Raskin |  |  |  | 12 kali | 12 kali | 12 kali | - | - | 12 kali | 12 kali | 12 kali | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - |
| 2 | * Jumlah promoosi/pameran yg dilaksanakan * jumlah data investasi |  |  |  | 6 kali  1 dok | 6 kali  1 dok | 6 kali  1 dok | - | - | 6 kali  1 dok | 6 kali  1 dok | 6 kali  1 dok | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - |
| 3 | * Realisasi investasi * rakor dan sosialisasi penanaman modal |  |  |  | 116.006.000.00  2 kali | 100.000.000  2 kali | 140.000.000.000  1 kali | - | - |  |  |  | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - |
| 4 | Jumlah tunggakan KEK Intan Pesada yang terbayar |  |  |  | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 54.000.000 | 58.000.000 | 82.029.178 | 48.381.056 | 21.330.002 |  |  |  |  |  |
| 5 | Jumlah peserta sosialisasi ketentuan di bidang cukai |  |  |  | 300 orang | 300 orang | 300 orang | 300 orang | 300 orang | 300 orang | 300 orang | 300 orang | 300 orang | 300 orang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Tersedianya jasa administrasi perkatoran |  |  |  | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | Jumlah pengadaan mebelair |  |  |  | 0 | 0 | 1 unit | 1 unit | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 |
| 10 | Jumlah pengadaan computer dan kelengkapannya |  |  |  | 0 | 0 | 1 unit | 1 unit | 0 | 0 | 0 | 1 unit | 1 unit | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 |
| 11 | Jumlah diklat bagi aparatur BUMD |  |  |  | 0 | 0 | 20 orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |
| 12 | Jumlah Monev penyaluran KUR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 kali | 4 kali | 0 | 0 | 0 | 4 kali | 4 kali | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 13 | Jumlah Monev SHAT |  |  |  | 0 | 0 | 1 kali | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 kali | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |
| \4 | Jumlah monitoring perkembangan inflasi |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 kali | 12 kali | 0 | 0 | 0 | 12 kali | 12 kali | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 15 | JUmlah Raperda Penyertaan modal |  |  |  | 1 Raperda | 1 Raperda | 1 Raperda | 0 | 0 | 1 Raperda | 1 Raperda | 1 Raperda | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 |
| 16 | Jumlah Raperda Penanaman Modal |  |  |  | 1 Raperda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Raperda | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jumlah monev pelaksanaan per UU di bidang cukai |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 kali | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 kali | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 18 | Jumlah monev perijinan |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 kali | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 kali | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |

Berdasarkan tabel pencapaian kinerja Bagian Adm. Perekonomian tahun 2013-2018 diatas dapat disimpulkan ba­­­­­­­­­hwa sebagian besar target kinerja dapat tercapai.

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah (Bagian Adm. Perekonomian Setda)

Kabupaten Magetan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian \*\*\*) | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%) | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| Program Administrasi Perkantoran |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| Kegiatanpenyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran | 100.000.000 | 90.000.000 | 190.000.000 | | 185.000.000 | | 193.570.000 | | 90.859.860 | 87.970.832 | | 176.176.438 | | 182.910.992 | | 193.015.195 | | 90,86 | 97,75 | | 97,72 | | 90,95 | | 99,71 | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| Kegiatan pengadaan mebelai | - | - | 20.000.000 | | - | | - | | - | - | | 20.000.000 | | - | | - | |  |  | | 100 | | - | | - | |
| Kegiatan pengadaan komputer | - | - | - | | 10.000.000 | | - | | - | - | |  | | 7.250.000 | | - | | - | - | |  | | 72,50 | |  | |
| Program pemberdayaan fakir miski,komunitas adat terpencil dan PMKS lainnya |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| Kegiatan pemberdayaan fakir miskin | 300.000.000 | 350.000.000 | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 36.588.000 | | 291.409.007 | 348.234.294 | | 348.790.997 | | 348.786.421 | | 36.588.000 | | 97,13 | 99,50 | | 99,65 | | 99,65 | | 100 | |
| **Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi** |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| **Kegiatan pengembangan potensi unggulan daerah** | 270.000.000 | 225.000.000 | 242.350.000 | | - | | - | | 214.993.450 | 222.119.535 | | 233.750.581 | | - | | - | | 79,63 | 98,72 | | 96,45 | | - | | - | |
| Kegiatan koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal | 60.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | | - | | - | | 47.455.000 | 49.283.898 | | 49.283.898 | |  | | - | | 79,09 | 98,57 | | 98,58 | | - | | - | |
| Program peningkatan investasi dan realissi investasi |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| Uraian \*\*\*) | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%) | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |
| Kegiatan Rakor dan sosialisasi penanaman modal, investasi dan kerja sama antar daerah | 75.000.000 | 50.000.000 | | 50.000.000 | | - | | - | 68.523.500 | | 49.164.000 | | 46.272.768 | | - | | - | 91,36 | | 98,33 | | 92,55 | | - | | - |
| Kegiatan penyusunan perda penanaman modal | 75.000.000 | - | | - | | - | | - | 73.264.800 | | - | | - | | - | | - | 97,69 | | - | | - | | - | | - |
| Kegiatan penyusunan Perda penyertaan modal | 150.000.000 | 150.000.000 | | 75.000.000 | | - | | - | 130.423.998 | | 149.895.340 | | 66,440.739 | | - | | - | 86,94 | | 99,93 | | 88,59 | | - | | - |
| Program penyiapan potensi sumberdaya sarana dan prasarana daerah |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Kegiatan penagihan dan evaluasi tunggakan KEK Intan Pesada | 30.000.000 | 15.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 30.000.000 | 29.934.885 | | 14.990.914 | | 18.800.979 | | 19.993.804 | | 20.373.940 | 99,78 | | 99,94 | | 94,00 | | 99,97 | | 67,91 |
| Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Kegiatan penyampaian ketentuan di bidang cukai | 596.118.154 | 741.090.265 | | 1.012.659.578 | | 1.063.520.665 | | 1.127.885.000 | 583.552.000 | | 736.900.376 | | 1.005.035/859 | | 1.054.099.326 | | 1.118.125.058 | 97,89 | | 99,43 | | 99,25 | | 99,09 | | 99,99 |
| Kegiatan pemantauan evaluasipelaksanaan ketentuan dibidang cukai | - | - | | - | | - | | 295.008.793 | - | | - | | - | | - | | 164.675.770 | - | | - | | - | | - | | 55,82 |
| Program peningkatan SDM aparatur |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Kegiatan manajeman kepemimpinan bagi apatur BUMD | - | - | | 75.000.000 | | - | | - | - | | - | | 73.692.073 | | - | | - | - | | - | | 98,26 | | - | | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian \*\*\*) | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yg kondusif |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kegiatan Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengahl | - | - | - | 45.532.000 | 43.565.000 | - | - | - | 42.122.500 | 36.300.000 | - | - | - | 92,54 | 83,32 |
| Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kegiatan pengendalian inflasi daerah | - | - | - | 149.450.000 | 150.000.000 | - | - | - | 135.957.098 | 146.603.078 | - | - | - | 90,95 | 97,74 |
| Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kegaiatan fasilitasi Pengembangan usaha Usaha Mikro kecil | - | - | - | 50.000.000 | - | - | - | - | 36.415.00 | - | - | - | - | 72,83 | - |
| Program percepatan pelaksanaan berusaha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kegiatan Rakor dan monitoring evaluasi pelayanan perizinan | - | - | - | - | 45.000.000 | - | - | - | - | 21.791.000 | - | - | - | - | 48,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Berdasarkan tabel pencapaian realisasi anggaran pada Bagian Adm. Perekonomian tahun 2013-2018 diatas dapat disimpulkan ba­­­­­­­­­hwa adanya efisiensi.

19

**2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Tantangan yang dihadapi Bagian Administrasi Perekonomian Setdakab Magetan untuk mewujudkan:mewujudkan data perekonomian dan investasi yang valid dan akurat dalam rangka menunjang pengambilan kebijakan perekonomian daerah, terwujudnya BUMD yang sehat dan berdaya saing dalam mendukung visi, misi Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut :

* 1. Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal
  2. Laju inflasi yang tidak stabil
  3. BUMD yang belum bisa berkembang dengan maksimal
  4. Regulasi bidang investasi yang masih rendah
  5. Masih kurangnya koordinasi dari OPD dalam menyusun program dan evaluasi pelaksanaan program;
  6. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bagian Administrasi Perekonomian masih kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas;

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian lima tahun kedepan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Peluang-peluang investasi dengan berbagai kemudahan untuk menarik investor.
2. Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk menumbuhkan dan meningkatkan UKM
3. Adanya berbagai kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsii yang mendorong kemajuan daerah.
4. Kebijakan untuk pengembangan usaha mikro melalui fasilitasi akses permodalan.

**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

**PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PerangkatDaerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bagian Administrasi Perekonomian mengalami beberapa permasalahan untuk mewujudkan visi dan pengembangan misi sebagai berikut:

a. Inflasi yang belum stabil;

b. Pembinaan tingkat kesehatan BUMD yang masih belum optimal;

c. Tingkat pertumbuhan usaha mikro yang masih rendah;

**3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Sesuai RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 telah dirumuskan visi sebagai berikut :

***“ MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB***

***DAN LEBIH SEJAHTERA ”***

Masyarakat Magetan yang SMART merupakan kepanjangan dari **Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil yang** merepresentasikankarakteristik masyarakat dan Sumber Daya manusia (SDM) zaman NOW. Masyarakat yang memiliki kemampuan jasmani (sehat), intelektual (maju), religiusitas (agamis), sosial (ramah) dan motorik (terampil) sebagai elemen-elemen penting bagi tumbuh dan berkembangnya wirausaha-wirausaha baru (enterpreneur) dalam berbagai bidang kehidupan produktif di Kabupaten Magetan.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Kabupaten Magetan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang akan fokus dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya dibidang sosial, ekonomi, budaya dan agama, serta memiliki rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintahan sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualitas dan maju.

Misi pembangunan Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 akan dapat terwujud dengan serangkaian misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai tugas untuk ikut mensukseskan ***misi yang kedua***, yakni meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.

**3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi**

**-**

**3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

-

**3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Selama periode lima tahun sebelumnya, isu-isu strategis yang merupakan fenomena dan permasalahan yang belum tertangani dan menjadi pekerjaan rumah dalam Renstra yang disusun saat ini, isu-isu strategis ini juga merupakan prediksi dari sebuah permasalahan atau potensi yang akan terjadi 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam rangka menyusun dokumentasi perencanaan pembangunan yang berkualitas secara sinergis, partisipatif dan akuntabel, Bagian Administrasi Perekonomian dihadapkan pada isu strategis yaitu :

* 1. Belum tersedianya data perekonomian yang valid dan akurat ;
  2. Pembinaan dalam pengelolaan BUMD yang masih belum efisien;
  3. Persaingan investasi dan persaingan antar daerah yang semakin tinggi;
  4. Kedinamisan peraturan dari pusat (sering berubah)/sering terjadi tumpang tindih/disharmonisasi peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**

**TUJUAN DAN SASARAN**

**4. 1. Tujuan Dan Sasaaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

**Tujuan :**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai/diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Tujuan jangka menengah Bagian Administrasi Perekonomian Setda Magetan yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengendalian laju inflasi
2. Terwujudnya BUMD yang sehat
3. Meningkatnya perkembangan usaha mikro

Indikator kinerja tujuan :

1. Laju inflasi 3 - 4 %
2. Presentase BUMD yang sehat
3. Presentase perkembangan usaha mikro

**Sasaran :**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang ingin dicapai Bagian Administrasi Perekonomian Setda Magetan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pengendalian inflasi daerah

Indikator sasaran :

Persentase kegiatan pengendalian inflasi daerah yang dikoordinasikan.

1. Meningkatnya kualitas pembinaan terhadap BUMD

Indikator sasaran :

Persentase kegiatan pembinaan BUMD yang dilaksanakan

1. Meningkatnya kualitas pengembangan usaha mikro

Indikator sasaran :

Persentase usaha mikro yang difasilitasi pengembangan usaha.

Tabel 4.1.

TUJUAN DAN SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | TUJUAN | Indikator Tujuan | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE - | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Meningkatnya pengendalian laju inflasi | Laju inflasi 3 - 4 % | Meningkatnya kualitas pengendalian inflasi daerah | Presentase kegiatan pengendalian inflasi daerah yang dikoordinasikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Terwujudnya BUMD yang sehat | Presentase BUMD yang sehat | Meningkatnya kualitas pembinaan terhadap BUMD | Persentase kegiatan pembinaan BUMD yang dilaksanakan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Meningkatnya perkembangan usaha mikro | Presentase perkembangan usaha mikro | Meningkatnya kualitas pengembangan usaha mikro | Persentase usaha mikro yang difasilitasi pengembangan usaha | 70% | 74% | 76% | 78% | 80% |

**BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Bagian Administrasi Perekonomian Kabupaten Magetan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 adalah:

**Strategi :**

Strategi Bagian Administrasi Perekonomian dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

* Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait dalam pengendalian inflasi daerah
* Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap BUMD
* Mendorong pengembangan Usaha Mikro

**Arah Kebijakan**

* Melaksanakan koordinasi lintas OPD terkait dalam pengendalian inflasi daerah
* Meningkatkan koordinasi secara intensif dalam melaksanakan pembinaan BUMD
* Fasilitasi akses permodalan dalam pengembangan Usaha Mikro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Visi : Masyarakat Magetan yang SMART semakin Mantab dan lebih Sejahtera | | | |
| Misi II :Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| Meningkatnya pengendalian laju inflasi | Meningkatnya kualitas pengendalian inflasi daerah | Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait dalam pengendalian inflasi daerah | Melaksanakan koordinasi lintas OPD dalam pengendalian inflasi daerah |
| Terwujudnya BUMD yang sehat | Meningkatnya kualitas pembinaan terhadap BUMD | Meningkatkan kualitas pembinaan BUMD | Meningkatkan koordinasi secara intensif dalam melaksanakan pembinaan BUMD |
| Meningkatnya perkembangan usaha mikro | Meningkatnya kualitas pengembangan usaha mikro | Mendorong pengembangan Usaha Mikro | Fasilitasi akses permodalan dalam pengembangan Usaha Mikro |

**BAB VI**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

**SERTA PENDANAAN**

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Didalam program kerja tersebut tercantum program prioritas yang akan dilaksanakan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan terutama untuk indikator hasil (Outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan menjadi bagian dari kebijakan anggaran dalam tahun tertentu.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indicator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah tersaji dalam tabel berikut :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tujuan | Sasaran | Indikator sasaran | Kode | | | | | Program dan Kegiatan | | Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) | | Data Capaian Awal Perencanaan (Tahun 2019) | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja/ SKPD penanggung jawab | | L o k a s i | |
| Tahun 2019 | | | | Tahun 2020 | | | | Tahun 2021 | | | | Tahun 2022 | | | | Tahun 2023 | | | | Tahun 2024 | | | | Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD | | | |
| Target | | Rp | | Target | | Rp | | Target | | Rp | | Target | | Rp | | Target | | Rp | | Tar  get | | Rp | | Target | | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | |
| Meningkatnya perkembangan usaha mikro | Meningkatnya kualitasperkembangan usaha mikro | Presentase usaha mikro yang difasilitasi pengembangan usaha |  |  |  |  |  | | **Program**  **Fasilitasi penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif** | | **Presentase usaha mikro yang difasilitasi permodalan** | | 100% | | 70% | |  | | 74% | |  | | 76% | |  | | 78% | |  | | 80% | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | Kegiatan  Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah | | Jumlah Monev UKM yang difasilitasi KUR | | 4 kali | | 4 kali | | 36.000.000 | | 4 kali | | 40.000.000 | | 4 kali | | 40.000.000 | | 4 kali | | 50.000.000 | | 4 kali | | 50.000.000 | |  | |  | | 20 kali | | 216.000.000 | | Subag bina Produksi | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | Kegiatan  Fasilitasi pengembangan Usah Kecil Mikro | | Jumlah monev UKM yang difailitasi SHAT | | - | | 4 kali | | 30.000.000 | | 4 kali | | 30.000.000 | | 4 kali | | 50.000.000 | | 4 kali | | 50.000.000 | | 4 kali | | 50.000.000 | |  | |  | | 20 kali | | 210.000.000 | | Subag bina Produksi | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | Kegiatan  Koordinasi dan pendataan Ekonomi Kreatif | | Jumlah data dokumen data ekonomi kreatif | | - | | 1 dok | | 50.000.000 | | 1 dok | | 50.000.000 | | 1 dok | | 50.000.000 | | 1 dok | | 50.000.000 | | 1 dok | | 50.000.000 | |  | |  | | 5 dok | | 250.000.000 | | Subag Bina sarana perekonomian | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | Kegiatan  Koorsibnasi dan pendataan Lembaga Keuangan Mikro | | Jumlah data dokumen Lembaga Keuangan Mikro | | - | | 1 dok | | 50.000.000 | | 1 dok | | 50.000.000 | | 1 dok | | 50.000.000 | | 1 dok | | 50.000.000 | | 1 dok | | 50.000.000 | |  | |  | | 5 dok | | 250.000.000 | | Subag Bina sarana perekonomian | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | Kegiatan  Penagiah dan evaluasi pelaksanaan KEK IP | | Jumlah tunggakan KEK IP yg terbayar | | 100.000.000 | | 50 juta | | 20.000.000 | | 50 juta | | 20.000.000 | | 50 juta | | 20.000.000 | | 50 juta | | 20.000.000 | | 50 juta | | 20.000.000 | |  | |  | | 250 juta | | 100.000.000 | | Subag Bina sarana perekonomian | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | Kegiatan  Penyusunan kebijakan pengembangan Usaha Kecil Menengah | | Jumlah dokumen kebijakan pengembangan UKM yang disusun | | - | | 1 dok | | 100.000.000 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | | 1 dok | | 100.000.000 | | Subag Sarana Produksi | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | Program  Percepatan pelaksanaan berusaha | | Presentase penyelsaian pelayanan perizinan sesuai ketentuan | | 100% | | 100% | |  | | 100% | |  | | 100% | |  | | 100% | |  | | 100% | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | Kegiatan  Rapat koordinasi dan monitoring evaluasi pelayanan perizinan | | Jumlah monev pelaksanaan pelayanan perizinan | | 4 kali | | 4 kali | | 50.000.000 | | 4 kali | | 75.000.000 | | 4 kali | | 75.000.000 | | 4 kali | | 100.000.000 | | 4 kali | | 100.000.000 | |  | |  | | 20 kali | | 400.000.000 | | Subag bina sarana produksi | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tujuan | Sasaran | Indikator sasaran | Kode | | | | | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) | Data Capaian Awal Perencanaan (Tahun 2019) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja/ SKPD penanggung jawab | L o k a s i |
| Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD | |
| Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | Program  Sosial;isasi ketentuan di Bidang Cukai | Presentase pelaksanaan kegiatan DBHCHT | 100 % | 100 % |  | 100 % |  | 100 % |  | 100 % |  | 100 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan  Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perundang- undangan di bidang cukai | Jumlah monev bidang cukai | 4 kali | 4 kali | 220.000.000 | 4 kali | 220.000.000 | 4 kali | 250.000.000 | 4 kali | 250.000.000- | 4 kali | 250.000.000 |  |  | 20 kali | 1.190.000.  000 | Subag bina Produksi |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan  penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang- undangan di Bidang Cukai kpd masyarakat dan/atau pemangku kepentingan | Jumlah  peserta sosialisasi ketentuan di bidang Cukai | 1500 orang | 300  orang | 850.000.  000 | 300  orang | 850.000.  000 | 300 orang | 900.000.  000 | 300  orang | 900.000.  000 | 300  orang | 950.000.0  00 |  |  | 1500 orang | 4.450..000.  000 | Subag  bina produksi |  |
| Meningkatnya kualitas pengendalian inflasi | Meningkatnya kualitas pengendalian inflasi daerah | Presentase kegiatan pengendalian inflasi daerah yg dikoordinasikan |  |  |  |  |  | Program fasiluitasi pengembangan ekonomi daerah | Presentase kegiatan pengendalianlaju inflasi yg dillasanakan |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan  Fasilitasi pengendalian inflasi daerah | Jumlah koordinasi kegiatan pengendalian inflasi daerah | 12 kali | 12 kali | 170.000.000 | 12 kali | 170.000.000 | 12 kali | 170.000.000 | 12 kali | 170.000.000 | 12 kali | 170.000.000 |  |  | 60 kali | 850.000.000 | Subag Bina sarana perekonomian |  |
| Terwujudnya BUMD yg sehat | Meningkatkan kualitas pembinaan BUMD | Presentase kegiatan pembinaan BUMD yg dilaksanakan |  |  |  |  |  | Program Pembinnaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | Prsentase BUMD yang dibina | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tujuan | Sasaran | Indikator sasaran | Kode | | | | | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) | Data Capaian Awal Perencanaan (Tahun 2019) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja/ SKPD penanggung jawab | L o k a s i |
| Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD | |
| Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan Pelatihan manajemen BUMD | Jumlah peserta pelatihan manajemen BUMD | - | 18 orang | 40.000.000 | 18 orang | 75.000.000 | 18 orang | 75.000.000 | 18 orang | 100.000.000 | 18 orang | 100.000.000 |  |  | 90 orang | 390.000.000 | Subag bina usaha daerah & investasi |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan  Monitoring dan evaluasi kinerja BUMD | Jumlah monev kinerja BUMD | - | 4 kali | 50.000.000 | 4 kali | 50.000.000 | 4 kali | 50.000.000 | 4 kali | 50.000.000 | 4 kali | 50.000.000 |  |  | 20 kali | 250.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan  Penyusunan Perda Penyertaan modal | Jumlah Perda Penyertaan modal yang disusun | - | 1 dok | 100.000.000 | 2 dok | 200.000.000 | - | - | - | - | - | - |  |  | 3 dok | 300.000.000 | Subag bina usaha daerah & investasi |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan  Penyusunan Perda BUMD | Jumlah Perda BUMD yang disusun | 2 dok | 2 dok | 200.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2 dok | 200.000.000 | Subag bina usaha daerah & investasi |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Program pelayanan administrasi perkantoran | Indeks kepuasan masyarakat |  | 75 |  | 77 |  | 78 |  | 79 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan penyediaan jasa dan pelayanan perkantoran | Jumlah penyediaan pelayanan administrasi perkantoran | 60 | 12 | 200.000  .000 | 12 | 200.000  .000 | 12 | 200.000  .000 | 12 | 200.000  .000 | 12 | 200.000.  000 |  |  | 60 | 1.000.000.  000 | Subag bina usaha daerah & investasi |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Presentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | - | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kegiatan Pengadaan perlengkapan kantor | Jumlah pengadaan perlengkapan kantor | 4 unit (2 kompt, 2 printer) | 4 unit (2 kompt, 2 printer) | 25.000.  000 | 4 unit (2 kompt, 2 printer) | 30.000.  000 | 4 unit (2 kompt, 2 printer) | 30.000.  000 | - | - | - | - |  |  | 12 unit (6 komptr, 6 printer) | 85.000.000 | Subag Bina sarana perekonomian |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Program  Peningkatan perencanaan, pelaporan kineraja dan keuangan perangkat daerah | Cakupan penyelesaian dokumen perencanaan laporan kinerja dan keuangan | - | - | - | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tujuan | Sasaran | Indikator sasaran | Kode | | | | | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) | Data Capaian Awal Perencanaan (Tahun 2019) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja/ SKPD penanggung jawab | L o k a s i |
| Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD | |
| Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan  Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah | Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, capaian kinerja dan keuangan | - | - | - | 8 dok | 16.000.000 | 8 dok | 17.500.000 | 8 dok | 18.000.000 | 9 dok | 19.000.000 |  |  | 33 dok | 71.000.000 |  |  |

**BAB VII**

**KINERJA PENYELENGGARAAN**

**BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Bagian Administrasi Perekonomian yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD tersaji dalam table berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Urusan Bagian Administrasi Perekonomian Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
| Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Presentase kegiatan pengendalian inflasi daerah yang dikoordinasikan | 36 kali | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Persentase kegiatan pembinaan BUMD yang dilaksanakan | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Meningkatnya kualitas pengembangan usaha mikro | - | 70% | 74% | 76% | 78% | 80% | 80% |

**BAB VIII**

**PENUTUP**

Penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan ini mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 yang merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 - 2023.

Pelaksanaan rencana strategis ini sangat memerlukan partisipasi dan komitmen seluruh aparatur karena akan menetukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Diharapkan rencana strategis ini tidak hanya sekedar menjadi dokumen administrasi tetapi merupakan pedoman yang dibutuhkan oleh seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan semua kegiatan harus memperhatikan sinkronisasi dan sinergisitas antar semua kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Bagian Administrasi Perekonomian, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh masing-masing Kepala Sub Bagian dan seluruh staf sehingga dalam pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif.

Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan dan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.